PENINGKATAN KAPASITAS FISKAL DAERAH DALAM PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DI KOTA PALOPO PROVINSI SULAWESI SELATAN

Aniza Frimasari Ridwan
NPP. 33.0916
Program Studi Keuangan Republik
Email: anizafrimasari@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si
Email: hyronimus_rowa@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study focuses on the suboptimal improvement of regional fiscal capacity in the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) in Palopo City. This condition is reflected in the fluctuation of Local Own-Source Revenue (PAD), the high dependence on transfer funds, the dominance of operational expenditure over capital expenditure, and the suboptimal integration of fiscal data in supporting regional planning and budgeting.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the improvement of regional fiscal capacity in the implementation of SIPD in Palopo City, South Sulawesi Province.* ***Method:*** *This study uses a qualitative descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and consisted of officials from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) and the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Palopo City.* ***Result:*** *The results show that the fiscal capacity of Palopo City tends to increase, but it has not yet established strong fiscal independence. PAD has increased nominally, but its contribution remains limited, while transfer funds continue to dominate regional revenue. The expenditure structure is also still dominated by operational expenditure. The findings indicate that the implementation of SIPD supports the documentation and management of fiscal data, but its utilization has not yet fully strengthened fiscal independence because regional revenue still depends heavily on transfers and fiscal data integration has not been optimally used for decision-making.* ***Conclusion:*** *The improvement of regional fiscal capacity in the implementation of SIPD in Palopo City has shown progress, but it still needs to be strengthened through PAD optimization, expenditure restructuring, personnel capacity improvement, SOP reinforcement, and stakeholder collaboration.*
Keywords: *Fiscal Capacity; Local Government; Regional Government Information System; SIPD*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Penelitian ini berfokus pada belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Palopo. Kondisi tersebut ditandai oleh fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal, serta belum optimalnya integrasi data fiskal dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam

pelaksanaan SIPD di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan ditentukan secara purposive sampling yang berasal dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah Kota Palopo cenderung meningkat, tetapi belum membentuk kemandirian fiskal yang kuat. PAD mengalami peningkatan secara nominal, tetapi kontribusinya masih terbatas, sedangkan dana transfer masih mendominasi pendapatan daerah. Struktur belanja daerah juga masih didominasi oleh belanja operasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD telah mendukung pendokumentasian dan pengelolaan data fiskal, tetapi pemanfaatannya belum sepenuhnya memperkuat kemandirian fiskal karena pendapatan daerah masih bergantung pada transfer dan integrasi data fiskal belum optimal digunakan dalam pengambilan keputusan. **Kesimpulan:** Peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan SIPD di Kota Palopo telah menunjukkan perkembangan, tetapi masih perlu diperkuat melalui optimalisasi PAD, penataan belanja, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan SOP, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan.
Kata kunci: Kapasitas Fiskal; Pemerintah Daerah; SIPD; Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kewenangan yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam menyediakan sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kemampuan tersebut berkaitan erat dengan kapasitas fiskal daerah. Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa kapasitas fiskal daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber keuangan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana bagi hasil, dan pendapatan transfer yang dikelola secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, kapasitas fiskal tidak hanya dilihat dari besarnya pendapatan daerah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola struktur pendapatan dan mengarahkan belanja daerah secara berkelanjutan.

Kota Palopo sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi persoalan kapasitas fiskal yang cukup menonjol. Struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer, sementara kontribusi PAD relatif terbatas. Rasio PAD terhadap total pendapatan daerah Kota Palopo pada tahun 2020 sebesar 18%, tahun 2021 sebesar 15%, tahun 2022 sebesar 18%, tahun 2023 sebesar 21%, dan tahun 2024 sebesar 23%, dengan rata-rata sebesar 19%. Sebaliknya, rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah pada periode yang sama mencapai rata-rata 79%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan Kota Palopo masih sangat bergantung pada dana transfer, sehingga ruang fiskal daerah untuk menentukan prioritas pembangunan secara mandiri masih terbatas.

Permasalahan kapasitas fiskal tersebut juga terlihat dari belum optimalnya realisasi sumber PAD, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah. Realisasi pajak daerah Kota Palopo pada tahun 2022 mencapai 96,12%, tahun 2023 sebesar 101,79%, dan tahun 2024 sebesar 98,65%. Sementara itu, realisasi retribusi daerah menunjukkan fluktuasi yang lebih besar, yaitu 138,72% pada tahun 2022, 90,08% pada tahun 2023, dan 81,65% pada tahun 2024. Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah tidak hanya berkaitan dengan peningkatan nominal pendapatan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan target yang realistis, menggali potensi pendapatan, serta mengendalikan realisasi pajak dan retribusi daerah secara konsisten.

Seiring dengan tuntutan tata kelola pemerintahan digital, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi instrumen penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah. SIPD berfungsi

sebagai sistem yang mengintegrasikan data perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan evaluasi pembangunan daerah. Secara regulatif, pelaksanaan SIPD didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan pentingnya sistem informasi pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Republik Indonesia, 2014). Ketentuan lebih lanjut mengenai SIPD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2019).

Penelitian Tumija, Hendra, dan Sinurat (2023) menunjukkan bahwa penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mendorong standardisasi proses penganggaran dan meningkatkan transparansi, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan kompetensi aparatur, infrastruktur teknologi informasi, dan kebutuhan adaptasi terhadap pembaruan sistem. Kochanova et al. (2020) menunjukkan bahwa e-government dapat mendukung peningkatan kapasitas pemerintah melalui perbaikan pengelolaan penerimaan, pengadaan, transparansi, dan efisiensi administrasi publik. Cuadrado-Ballesteros et al. (2022) menjelaskan bahwa e-government berperan dalam mendukung manajemen keuangan sektor publik melalui penguatan sistem akuntansi dan informasi keuangan.

Dalam konteks fiskal daerah, e-government juga memiliki hubungan dengan penguatan kondisi keuangan pemerintah daerah. Yan et al. (2023) menunjukkan bahwa e-government dapat membantu mengurangi defisit fiskal pemerintah daerah melalui peningkatan efektivitas pengelolaan pemerintahan dan perluasan basis ekonomi lokal. Oleh karena itu, pelaksanaan SIPD di Kota Palopo perlu dilihat bukan hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kualitas data fiskal, mendukung pengambilan keputusan, mengendalikan realisasi anggaran, serta mengoptimalkan potensi PAD.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan SIPD di Kota Palopo menjadi penting dilakukan. Hal ini karena Kota Palopo masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kontribusi PAD, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, dominasi belanja operasi, serta belum optimalnya integrasi data fiskal dalam mendukung perencanaan dan penganggaran daerah. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan SIPD di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Palopo. Permasalahan tersebut terlihat dari masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer, dominasi belanja operasi dibandingkan belanja modal, serta belum optimalnya integrasi data fiskal dalam mendukung proses perencanaan dan penganggaran daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah. Tumija et al. (2023) meneliti penerapan SIPD pada BPKAD Kota Semarang dan menemukan bahwa SIPD mampu mendukung standardisasi penganggaran serta transparansi pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih menghadapi kendala sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Penelitian lain oleh Nasution dan Nurwani (2021) membahas penerapan SIPD pada BPKAD Kota Medan dengan fokus pada kendala teknis, proses input data, dan kesiapan pengguna dalam mengoperasikan sistem.

Kajian internasional juga menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintahan dan e-government memiliki peran penting dalam mendukung tata kelola keuangan sektor publik. Kochanova et al. (2020) menjelaskan bahwa e-government dapat meningkatkan kapasitas pemerintah melalui efisiensi administrasi, pengelolaan penerimaan, dan pengadaan publik. Yan et al. (2023) menemukan bahwa e-government dapat membantu mengurangi defisit fiskal pemerintah daerah melalui peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Gilley dan Laochankham (2024) menunjukkan bahwa penguatan pemerintah daerah berkaitan erat dengan kebijakan fiskal dan hubungan keuangan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Penelitian tersebut relevan sebagai pembanding internasional dalam memahami kapasitas fiskal dan penguatan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada implementasi SIPD, efektivitas penggunaan sistem, kendala teknis, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang secara khusus mengaitkan pelaksanaan SIPD dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah masih terbatas, terutama pada konteks Kota Palopo. Padahal, Kota Palopo memiliki persoalan fiskal yang cukup menonjol, seperti rendahnya kontribusi PAD, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, serta struktur belanja yang masih didominasi oleh belanja operasi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan SIPD dapat mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah di Kota Palopo. Penelitian ini tidak hanya melihat SIPD sebagai sistem administrasi penganggaran, tetapi juga sebagai sarana pengelolaan data fiskal yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan PAD, mengendalikan realisasi anggaran, memperbaiki struktur belanja, dan memperkuat pengambilan keputusan fiskal daerah.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu aspek utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Kota Palopo masih menghadapi tantangan fiskal berupa rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer, serta struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ruang fiskal daerah masih terbatas, sehingga pemerintah daerah perlu memperkuat pengelolaan pendapatan dan belanja secara lebih efektif.

Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai instrumen pengelolaan data dan informasi keuangan daerah. SIPD tidak hanya berfungsi sebagai sarana administratif dalam proses perencanaan dan penganggaran, tetapi juga dapat mendukung penyediaan data fiskal yang lebih terintegrasi untuk pengambilan keputusan. Tumija et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan SIPD dapat mendukung standardisasi penganggaran dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, meskipun masih terdapat kendala pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi.

Secara keilmuan, penelitian ini penting karena masih terbatas kajian yang secara khusus menghubungkan pelaksanaan SIPD dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi SIPD, efektivitas sistem, atau kendala teknis penggunaan aplikasi. Sementara itu, hubungan antara SIPD sebagai sistem informasi pemerintahan dengan penguatan kapasitas fiskal daerah, khususnya dalam konteks Kota Palopo, masih perlu dikaji lebih lanjut. Yan et al. (2023) menunjukkan bahwa e-government dapat membantu memperbaiki kondisi fiskal pemerintah daerah melalui peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan.

Secara praktis, penelitian ini penting bagi Pemerintah Kota Palopo, khususnya BPKAD dan Bappeda, sebagai bahan evaluasi dalam memperkuat kapasitas fiskal melalui pemanfaatan SIPD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kondisi fiskal daerah, hambatan dalam pelaksanaan SIPD, serta upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan PAD, menata struktur belanja, meningkatkan kapasitas aparatur, dan memperkuat sinkronisasi data fiskal.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, pemerintah daerah berpotensi kekurangan dasar empiris dalam merumuskan kebijakan penguatan kapasitas fiskal yang berbasis data. Dampaknya, pelaksanaan SIPD dapat terus berjalan sebatas kewajiban administratif tanpa dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan fiskal. Selain itu, persoalan ketergantungan terhadap dana transfer, rendahnya kontribusi PAD, dan dominasi belanja operasi dapat terus berlanjut sehingga menghambat kemandirian fiskal dan efektivitas pembangunan daerah di Kota Palopo.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), e-government, pengelolaan keuangan daerah, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem informasi dalam pemerintahan daerah memiliki peran penting dalam mendukung perencanaan, penganggaran, pelaporan, transparansi, serta pengambilan keputusan fiskal.

Ratu dan Haromin (2024) meneliti optimalisasi pelaporan pendapatan daerah melalui SIPD di Kota Palopo Sulawesi Selatan. Penelitian tersebut relevan karena memiliki lokus yang sama dengan penelitian ini, tetapi fokusnya lebih menekankan pada pelaporan pendapatan daerah, sedangkan penelitian ini membahas peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan SIPD.

Tumija et al. (2023) meneliti penerapan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dapat mendukung standardisasi penganggaran dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, penelitian tersebut juga menemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kendala infrastruktur teknologi informasi, serta kebutuhan adaptasi terhadap pembaruan sistem.

Tumija dan Erlambang (2023) meneliti implementasi SIPD dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu. Penelitian tersebut relevan karena membahas pemanfaatan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Nasution dan Nurwani (2021) meneliti penerapan SIPD pada BPKAD Kota Medan. Penelitian tersebut membahas penggunaan SIPD dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah serta kendala yang dihadapi dalam proses penerapannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah membantu proses pengelolaan data keuangan daerah, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi hambatan teknis, terutama dalam proses input data, kesiapan pengguna, dan penyesuaian terhadap sistem yang digunakan.

Balqis et al. (2021) meneliti implementasi aplikasi SIPD pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis implementasi melalui aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD masih menghadapi kendala pada komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, serta keterbatasan waktu dalam penggunaan aplikasi. Penelitian ini relevan karena menunjukkan bahwa keberhasilan SIPD tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, tetapi juga oleh kesiapan organisasi dan aparatur pelaksana.

Maulani et al. (2024) menjelaskan bahwa implementasi SIPD sebagai inovasi teknologi pemerintahan dapat mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena sama-sama melihat SIPD sebagai instrumen digital dalam mendukung

pengelolaan keuangan daerah, meskipun penelitian ini lebih menekankan pada peningkatan kapasitas fiskal daerah di Kota Palopo.

Dione dan Faradina (2020) meneliti implementasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dalam meningkatkan koordinasi pembangunan di daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa SIPD dapat mendukung koordinasi pembangunan daerah melalui penyediaan data dan informasi yang lebih terintegrasi. Namun, pelaksanaan sistem masih menghadapi kendala seperti kesadaran pelaksana, keterbatasan sumber daya, dan belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah.

Kochanova et al. (2020) meneliti pengaruh e-government terhadap kapasitas pemerintah dengan melihat aspek biaya kepatuhan pajak, penerimaan pajak, dan daya saing pengadaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran fiskal. Penelitian ini relevan karena memberikan dasar bahwa sistem digital pemerintahan dapat mendukung penguatan kapasitas fiskal melalui pengelolaan sumber daya publik yang lebih efektif.

Yan et al. (2023) meneliti pengaruh e-government terhadap defisit fiskal pemerintah daerah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa e-government dapat membantu mengurangi defisit fiskal pemerintah daerah melalui peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena sama-sama mengaitkan pemanfaatan sistem pemerintahan digital dengan kondisi fiskal pemerintah daerah.

Iacuzzi (2022) mengkaji indikator keuangan pemerintah daerah melalui pendekatan tinjauan literatur terstruktur. Penelitian tersebut menekankan pentingnya indikator keuangan dalam menilai kondisi keuangan dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Penelitian ini relevan karena penelitian penulis juga membahas kapasitas fiskal daerah melalui komponen pendapatan, transfer, dan belanja daerah.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa SIPD dan e-government memiliki peran penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah, transparansi, koordinasi, serta penguatan kapasitas pemerintah. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada implementasi sistem, efektivitas penggunaan aplikasi, kendala teknis, dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian yang secara khusus membahas peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan SIPD, khususnya di Kota Palopo, masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki posisi yang berbeda karena mengaitkan pelaksanaan SIPD dengan penguatan kapasitas fiskal daerah melalui PAD, dana transfer, struktur belanja, kesiapan aparatur, dan sinkronisasi data fiskal daerah.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah karena menghubungkan dua fokus kajian yang pada penelitian terdahulu umumnya masih dibahas secara terpisah, yaitu pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Penelitian terdahulu mengenai SIPD lebih banyak menekankan pada aspek implementasi sistem, pengelolaan keuangan daerah, transparansi, akuntabilitas, kendala teknis, serta kesiapan sumber daya manusia. Sementara itu, penelitian mengenai kapasitas fiskal daerah lebih banyak membahas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, kemandirian fiskal, dan ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang menempatkan SIPD bukan hanya sebagai aplikasi administrasi perencanaan dan penganggaran, tetapi juga sebagai instrumen pendukung penguatan kapasitas fiskal daerah. Penelitian ini menganalisis bagaimana pelaksanaan SIPD dapat mendukung pengelolaan data fiskal, pengendalian realisasi anggaran, optimalisasi PAD, serta pengambilan keputusan fiskal di Kota Palopo. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang yang lebih spesifik mengenai peran sistem informasi pemerintahan daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.

Dari segi objek penelitian, kebaruan penelitian ini juga terletak pada lokus kajian, yaitu Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian sebelumnya lebih banyak dilakukan pada daerah lain, seperti Kota Semarang, Kota Medan, Kabupaten Aceh Barat, dan beberapa wilayah provinsi lain. Sementara itu, kajian mengenai peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan SIPD di Kota Palopo masih terbatas, padahal daerah ini memiliki karakteristik fiskal yang penting untuk dikaji, seperti rendahnya kontribusi PAD, tingginya ketergantungan terhadap dana transfer, dan struktur belanja yang masih didominasi oleh belanja operasi.

Dari segi substansi, penelitian ini berbeda karena tidak hanya menjelaskan pelaksanaan SIPD, tetapi juga mengaitkannya dengan komponen kapasitas fiskal daerah yang meliputi PAD, dana transfer, dan belanja daerah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian keuangan publik daerah, khususnya terkait hubungan antara sistem informasi pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, dan kapasitas fiskal daerah.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Palopo. Metode kualitatif deskriptif dinilai tepat karena permasalahan yang diteliti tidak hanya berkaitan dengan angka-angka fiskal, tetapi juga menyangkut proses, kebijakan, kendala, peran aparatur, koordinasi antarlembaga, serta pemanfaatan data keuangan daerah dalam pelaksanaan SIPD.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mendalam dari pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan SIPD. Observasi digunakan untuk melihat pelaksanaan SIPD dan kondisi pengelolaan data keuangan daerah pada lokus penelitian. Dokumentasi digunakan untuk menelaah data sekunder berupa dokumen anggaran, laporan keuangan, regulasi, SOP, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kapasitas fiskal daerah serta pelaksanaan SIPD di Kota Palopo.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kompetensi, keterlibatan, dan pemahaman terhadap fokus penelitian. Informan dipilih karena memiliki keterlibatan langsung dalam pengelolaan keuangan daerah, penganggaran berbasis SIPD, pengelolaan PAD, dana transfer, serta penyusunan dokumen perencanaan dan laporan keuangan daerah. Informan penelitian berjumlah enam orang, yaitu Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Bidang Anggaran BPKAD, Kepala Bidang Perencanaan Bappeda, admin atau pengelola SIPD bidang keuangan pada BPKAD, dan admin atau pengelola SIPD bidang perencanaan pada Bappeda. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Kepala BPKAD Kota Palopo karena memiliki kewenangan dan pemahaman strategis terkait pengelolaan keuangan daerah, kapasitas fiskal, penganggaran, serta pelaksanaan SIPD di lingkungan Pemerintah Kota Palopo.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu, dan member check. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan BPKAD, Bappeda, dan pengelola SIPD. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Triangulasi waktu digunakan untuk melihat konsistensi informasi yang diperoleh dalam waktu berbeda. Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali data kepada informan agar hasil penelitian sesuai dengan informasi yang diberikan di lapangan.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Kondensasi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data sesuai tema penelitian, seperti PAD, dana transfer, belanja daerah, kapasitas SDM, infrastruktur digital, SOP, dan sinkronisasi data SIPD. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel, dan uraian tematik agar hubungan antar-data dapat dianalisis secara sistematis. Selanjutnya, penarikan dan verifikasi kesimpulan dilakukan untuk menemukan pola, hubungan, serta makna dari temuan penelitian mengenai peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan SIPD di Kota Palopo.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan selama kurang lebih satu bulan pada Januari 2026 melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan SIPD.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Palopo dengan menggunakan konsep kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan mengelola sumber pembiayaan yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pembahasan difokuskan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), pendapatan transfer, serta kemampuan daerah dalam mengelola belanja secara efektif dan efisien.

3.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kapasitas fiskal daerah karena menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan yang berasal dari wilayahnya sendiri. Dalam konteks pelaksanaan SIPD, PAD menjadi komponen penting karena data pendapatan yang terdokumentasi dalam sistem dapat digunakan sebagai dasar perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi keuangan daerah.

Perkembangan PAD Kota Palopo selama periode 2020–2024 menunjukkan kecenderungan meningkat secara nominal, tetapi belum stabil dari sisi pencapaian target. Realisasi PAD pada tahun 2020 sebesar Rp177.205,05 juta, kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi Rp140.133,04 juta. Pada tahun 2022 realisasi PAD meningkat menjadi Rp178.675,85 juta, tahun 2023 menjadi Rp194.013,65 juta, dan tahun 2024 meningkat kembali menjadi Rp207.535,85 juta. Meskipun demikian, capaian terhadap target PAD belum selalu optimal, terutama pada tahun 2023 yang hanya mencapai 56,56%.

Tabel 1.
Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Palopo tahun 2020–2024 dalam juta rupiah

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Capaian (%)
2020	173.393,62	177.205,05	102,20
2021	153.896,34	140.133,04	91,06
2022	188.028,16	178.675,85	95,03
2023	343.052,41	194.013,65	56,56
2024	248.604,22	207.535,85	83,48

Sumber: LRA APBD Kota Palopo Tahun 2020–2024.

Berdasarkan **Tabel 1**, peningkatan PAD Kota Palopo belum sepenuhnya menunjukkan kapasitas fiskal yang kuat. Hal ini karena peningkatan nominal PAD belum diikuti oleh konsistensi pencapaian target. Capaian PAD yang rendah pada tahun 2023 menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan dalam penetapan target, validitas data potensi pendapatan, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan sumber-sumber pendapatan daerah.

Hasil wawancara dengan pejabat BPKAD menunjukkan bahwa SIPD membantu pemerintah daerah dalam menyediakan data pendapatan dan penganggaran secara lebih terdokumentasi. Namun, pemanfaatan data tersebut masih perlu diperkuat agar tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi juga untuk mengidentifikasi potensi PAD, mengawasi capaian realisasi pendapatan, dan memperbaiki dasar penetapan target pendapatan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan SIPD di Kota Palopo telah mendukung pengelolaan data PAD, tetapi belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah secara kuat.

3.2. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen kapasitas fiskal daerah yang berasal dari pembagian penerimaan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini, DBH dilihat sebagai salah satu sumber pendapatan yang dapat memperkuat kemampuan fiskal Kota Palopo selain PAD. DBH juga penting dalam pelaksanaan SIPD karena data penerimaan DBH perlu tercatat dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan serta penganggaran daerah.

Realisasi DBH Kota Palopo selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Total DBH pada tahun 2020 sebesar Rp64.823,03 juta, meningkat menjadi Rp68.277,93 juta pada tahun 2021, kemudian naik menjadi Rp83.593,94 juta pada tahun 2022 dan Rp85.841,31 juta pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 total DBH menurun menjadi Rp63.882,52 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa DBH memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi belum menjadi sumber fiskal yang stabil.

Tabel 2.
Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Palopo tahun 2020–2024 dalam juta rupiah

Tahun	DBH Pajak	DBH Bukan Pajak	Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	Total DBH
2020	13.443,56	4.935,82	46.443,64	64.823,03
2021	17.551,97	7.660,43	43.065,51	68.277,93

2022	14.743,51	12.511,77	56.338,64	83.593,94
2023	13.904,08	3.669,37	68.267,85	85.841,31
2024	13.386,24	3.621,64	46.874,63	63.882,52

Sumber: Hasil Pengolahan dari LRA APBD Kota Palopo Tahun 2020–2024.

Berdasarkan **Tabel 2**, penerimaan DBH Kota Palopo masih mengalami naik turun. Peningkatan tertinggi terlihat pada tahun 2023, sedangkan penurunan terjadi pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa DBH belum sepenuhnya dapat dijadikan sumber pendapatan yang stabil untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Meskipun demikian, DBH tetap memiliki peran dalam memperluas ruang fiskal daerah, terutama ketika PAD belum mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap total pendapatan daerah.

Dalam pelaksanaan SIPD, data DBH menjadi bagian penting dalam penyusunan APBD karena memengaruhi kemampuan daerah dalam membiayai program dan kegiatan. Hasil wawancara dengan pihak Bappeda menunjukkan bahwa perubahan ruang fiskal dapat memengaruhi program yang sudah direncanakan. Dengan adanya SIPD, proses perencanaan dan penganggaran menjadi lebih mudah dikendalikan, tetapi apabila anggaran final berubah, beberapa program tetap harus disesuaikan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa SIPD membantu proses pengendalian data, tetapi kapasitas fiskal daerah tetap bergantung pada stabilitas dan kepastian sumber pendapatan.

3.3. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah Kota Palopo. Dalam konteks kapasitas fiskal, tingginya pendapatan transfer menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Ketergantungan tersebut berpengaruh terhadap fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan secara mandiri.

Data keuangan daerah menunjukkan bahwa realisasi pendapatan transfer Kota Palopo pada tahun 2020 sebesar Rp726.676,04 juta, meningkat menjadi Rp770.932,81 juta pada tahun 2021 dan Rp799.667,31 juta pada tahun 2022. Pada tahun 2023 pendapatan transfer menurun menjadi Rp736.794,91 juta dan pada tahun 2024 kembali menurun menjadi Rp709.128,72 juta. Meskipun mengalami penurunan pada dua tahun terakhir, pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah Kota Palopo.

Tabel 3.
Realisasi transfer pemerintah pusat dan antardaerah Kota Palopo tahun 2020–2024 dalam juta rupiah

Tahun	Transfer Pemerintah Pusat	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Transfer Antardaerah	Total Pendapatan Transfer
2020	665.583,96	6.983,79	46.443,64	726.676,04
2021	693.964,11	28.986,51	47.982,18	770.932,81
2022	728.659,63	9.008,18	61.999,49	799.667,31
2023	658.233,06	5.930,15	72.631,69	736.794,91
2024	654.149,90	0,00	54.978,81	709.128,72

Sumber: Hasil Pengolahan dari LRA APBD Kota Palopo Tahun 2020–2024.

Berdasarkan **Tabel 3**, dominasi pendapatan transfer juga terlihat dari rasio ketergantungan fiskal daerah. Rasio ketergantungan fiskal Kota Palopo pada tahun 2020 sebesar 74,96%, tahun 2021 sebesar 82,31%, tahun 2022 sebesar 80,92%, tahun 2023 sebesar 78,13%, dan tahun 2024 sebesar 77,36%. Rata-rata rasio ketergantungan fiskal selama periode 2020–2024 mencapai 78,74%. Artinya, hampir empat perlima pendapatan daerah Kota Palopo masih bersumber dari transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Tabel 4.
Rasio ketergantungan fiskal daerah Kota Palopo tahun 2020–2024 dalam juta rupiah

Tahun	Pendapatan Transfer	PAD	Total Pendapatan	Rasio Ketergantungan Fiskal (%)
2020	726.676,04	177.203,60	969.407,48	74,96
2021	770.932,81	140.133,04	936.589,79	82,31
2022	799.667,31	178.675,84	988.195,05	80,92
2023	736.794,91	194.013,65	943.090,23	78,13
2024	709.128,72	207.535,85	916.664,57	77,36
Rata-rata				78,74

Sumber: Hasil Pengolahan dari data LRA APBD Kota Palopo Tahun 2020–2024.

Berdasarkan **Tabel 4**, kapasitas fiskal Kota Palopo belum dapat dikatakan mandiri secara kuat karena pendapatan transfer masih mendominasi struktur pendapatan daerah. Penurunan rasio ketergantungan pada tahun 2023 dan 2024 memang menunjukkan adanya perbaikan, tetapi angka tersebut masih berada pada kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum cukup besar untuk mengurangi ketergantungan fiskal daerah terhadap sumber pendapatan dari luar kewenangan langsung pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan SIPD, dominasi pendapatan transfer menuntut pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam menyusun prioritas program. SIPD membantu pemerintah daerah dalam menyelaraskan data pendapatan, pagu anggaran, dan program kegiatan. Namun, ketika pendapatan transfer mengalami perubahan atau ruang fiskal menurun, pemerintah daerah tetap perlu melakukan penyesuaian terhadap program yang telah direncanakan. Dengan demikian, SIPD berperan sebagai alat bantu pengendalian dan penyesuaian perencanaan, tetapi belum dapat menggantikan kebutuhan dasar berupa penguatan sumber pendapatan daerah.

3.4. Kemampuan Daerah Mengelola Belanja Secara Efektif dan Efisien

Kapasitas fiskal daerah tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh pendapatan, tetapi juga oleh kemampuan mengelola belanja secara efektif dan efisien. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa belanja daerah tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi juga diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Dalam konteks SIPD, pengelolaan belanja yang efektif membutuhkan data yang terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.

Data keuangan daerah Kota Palopo menunjukkan bahwa struktur belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi. Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah berada pada angka 77% pada tahun

2020, 78% pada tahun 2021, 74% pada tahun 2022, 80% pada tahun 2023, dan 89% pada tahun 2024. Rata-rata rasio belanja operasi selama lima tahun mencapai 80%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah masih digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan.

Tabel 5.
Rasio belanja operasi terhadap total belanja daerah Kota Palopo tahun 2020–2024

Tahun	Total Belanja Daerah (Rp)	Belanja Operasi (Rp)	Rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja Daerah (%)
2020	943.899.35	727.087.33	77
2021	935.475.34	728.746.01	78
2022	1.015.338.13	750.411.61	74
2023	927.786.55	745.228.56	80
2024	930.013.17	829.732.01	89
Rata-rata			**80**

Sumber: Hasil Pengolahan dari data keuangan daerah Kota Palopo Tahun 2020–2024.

Berdasarkan **Tabel 5**, tingginya belanja operasi menunjukkan bahwa ruang fiskal untuk belanja yang bersifat produktif masih terbatas. Kondisi ini berdampak pada kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan jangka panjang, terutama belanja modal. Ketika belanja operasi terus mendominasi, kemampuan daerah untuk memperkuat infrastruktur dan pelayanan publik melalui belanja modal menjadi semakin terbatas.

Sebaliknya, belanja modal Kota Palopo cenderung memiliki proporsi yang lebih kecil dibandingkan belanja operasi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur belanja daerah belum sepenuhnya ideal dalam mendukung pembangunan daerah jangka panjang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kota Palopo, ketika bantuan dari pusat berkurang, kebutuhan pembangunan tertentu harus dibiayai melalui APBD, sehingga program lain perlu disesuaikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan ruang fiskal berdampak langsung terhadap prioritas belanja daerah.

Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kota Palopo juga menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menjaga kesehatan fiskal melalui pengendalian realisasi kegiatan dan belanja. Setiap perangkat daerah diarahkan untuk memperbarui realisasi kegiatan dan belanja secara berkala agar keseimbangan antara pendapatan dan belanja dapat dikendalikan. Dalam hal ini, SIPD membantu proses pengendalian perencanaan dan penganggaran karena data program, kegiatan, dan anggaran dapat dipantau secara lebih sistematis.

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan SIPD belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan struktur belanja daerah. SIPD membantu pemerintah daerah dalam menyusun, mencatat, dan mengendalikan data belanja, tetapi efektivitas belanja tetap bergantung pada kapasitas fiskal daerah, kualitas perencanaan, komitmen aparatur, dan kemampuan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran. Dengan demikian, pengelolaan belanja Kota Palopo sudah mulai diarahkan melalui sistem informasi, tetapi masih menghadapi tantangan dalam menciptakan struktur belanja yang lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan SIPD di Kota Palopo telah menunjukkan perkembangan, tetapi belum sepenuhnya optimal. PAD mengalami peningkatan secara nominal, tetapi kontribusinya masih terbatas dan capaian targetnya belum konsisten. Dana transfer masih menjadi sumber pendapatan dominan, sementara belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SIPD telah membantu pengelolaan data fiskal, tetapi belum secara langsung membentuk kemandirian fiskal yang kuat.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Tumija et al. (2023) yang menunjukkan bahwa SIPD dapat mendukung standardisasi penganggaran dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Dalam konteks Kota Palopo, SIPD juga membantu proses dokumentasi, perencanaan, dan pengendalian data keuangan, tetapi pemanfaatannya masih perlu diperkuat agar mampu mendukung optimalisasi PAD dan pengambilan keputusan fiskal yang lebih strategis.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan Nasution dan Nurwani (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan SIPD dapat membantu pengelolaan keuangan daerah, tetapi masih menghadapi kendala teknis dan kesiapan pengguna. Di Kota Palopo, kendala tersebut terlihat dari belum optimalnya integrasi data fiskal dan masih perlunya penguatan kapasitas aparatur dalam memanfaatkan SIPD sebagai dasar analisis fiskal.

Dari perspektif e-government, temuan penelitian ini sejalan dengan Yan et al. (2023) yang menyatakan bahwa e-government dapat membantu memperbaiki kondisi fiskal pemerintah daerah melalui peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan. Dalam penelitian ini, SIPD berpotensi mendukung peningkatan kapasitas fiskal karena dapat menyediakan data pendapatan dan belanja yang lebih terintegrasi. Namun, manfaat tersebut baru dapat optimal apabila data dalam SIPD digunakan secara aktif untuk menggali potensi PAD, mengendalikan belanja, dan menyusun prioritas anggaran yang sesuai dengan kondisi fiskal daerah.

Berdasarkan hasil observasi penulis, pelaksanaan SIPD di BPKAD dan Bappeda Kota Palopo telah digunakan dalam proses pendokumentasian dan pengendalian data keuangan daerah. Namun, pemanfaatannya masih perlu diperkuat sebagai dasar analisis fiskal dan pengambilan keputusan. Peningkatan kapasitas fiskal Kota Palopo tetap sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam meningkatkan PAD, mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer, mengendalikan belanja operasi, meningkatkan kualitas perencanaan, dan memanfaatkan data SIPD sebagai dasar pengambilan keputusan fiskal.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan telah menunjukkan perkembangan, tetapi belum sepenuhnya membentuk kapasitas fiskal yang kuat dan mandiri. Hal ini terlihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat secara nominal tetapi kontribusinya masih terbatas, Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih fluktuatif, pendapatan transfer yang tetap mendominasi struktur pendapatan daerah, serta belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja operasi dibandingkan belanja modal. Dengan demikian, pelaksanaan SIPD telah membantu pengelolaan data dan informasi keuangan daerah, tetapi peningkatan kapasitas fiskal Kota Palopo masih perlu diperkuat melalui pengelolaan PAD, pendapatan transfer, dan belanja daerah yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada waktu pelaksanaan penelitian, ruang lingkup lokus penelitian, dan keterbatasan akses terhadap data fiskal yang lebih rinci. Penelitian ini hanya dilakukan di Kota Palopo dengan fokus pada BPKAD dan Bappeda, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan pelaksanaan SIPD dan kapasitas fiskal daerah pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan agar penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada beberapa daerah lain dengan karakteristik fiskal yang berbeda untuk memperoleh perbandingan yang lebih luas mengenai hubungan pelaksanaan SIPD dan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Penelitian lanjutan juga dapat menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk mengukur pengaruh pemanfaatan SIPD terhadap PAD, ketergantungan transfer, struktur belanja, dan kemandirian fiskal daerah secara lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Palopo, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palopo, yang telah memberikan kesempatan, data, informasi, dan dukungan kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh informan dan pihak terkait yang telah meluangkan waktu serta membantu kelancaran proses pengumpulan data hingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Balqis, N., Fadhly, Z., & Az, M. (2021). Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 11*(1), 146–161. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v11i1.1953

Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Bisogno, M. (2022). Public-sector financial management and e-government: The role played by accounting systems. *International Journal of Public Administration, 45*(8), 605–619. https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1868506

Dione, F., & Faradina, U. (2020). Implementation of Regional Development Information System (SIPD) in increasing coordination of regional development. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan, 3*(1), 21–28. https://doi.org/10.33701/jkp.v3i1.1061

Gilley, B., & Laochankham, S. (2024). Can fiscal recentralization strengthen local government? The case of Thailand. *International Journal of Public Administration, 47*(4), 257–268. https://doi.org/10.1080/01900692.2022.2111580

Iacuzzi, S. (2022). An appraisal of financial indicators for local government: A structured literature review. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 34*(6), 69–94. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-04-2021-0064

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kochanova, A., Hasnain, Z., & Larson, B. (2020). Does e-government improve government capacity? Evidence from tax compliance costs, tax revenue, and public procurement competitiveness. *The World Bank Economic Review, 34*(1), 101–120. https://doi.org/10.1093/wber/lhx024

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Erlangga.

Maulani, A., Anshori, M. I., & Andriani, N. (2024). Inovasi teknologi dalam pemerintahan: Implementasi SIPD sebagai alat untuk mendukung optimalisasi pengelolaan keuangan daerah. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7*(2), 1415–1422. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3451

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.

Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 9*(2), 109–116. https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/4577

Pemerintah Kota Palopo. (2024). *Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Palopo tahun 2020–2024*. Pemerintah Kota Palopo.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Ratu, R. S., & Haromin, H. (2024). *Optimalisasi pelaporan pendapatan daerah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kota Palopo Sulawesi Selatan*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. https://eprints.ipdn.ac.id/19703/

Tumija, T., & Erlambang, P. A. (2023). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan anggaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Media Birokrasi, 5*(2), 155–169. https://doi.org/10.33701/jmb.v5i2.3696

Tumija, T., Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Media Birokrasi, 5*(1), 79–91. https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389

Yan, Y.-C., Shi, Y., & You, W. (2023). Can e-government reduce local governments' financial deficits?——Analysis based on county-level data from China. *Government Information Quarterly, 40*(3), 101812. https://doi.org/10.1016/j.giq.2023.101812